



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 15 Juli 2021

Halaman: 5

► TENAGA KERJA PERHOTELAN

Pegawai Hotel Rawan Kena PHK

UMBULHARJO— Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, ada asumsi 50% pegawai perhotelan yang mengalami penurunan upah ataupun pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sirojul Khalid
sirojul@harianjogja.com

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Rihari Wulandari menilai tidak amannya nasib pekerja hotel itu lantaran menurunnya tingkat kunjungan hotel selama PPKM Darurat.

Saat ini ada sekitar 600 hotel di Jogja dengan kondisi sebelum pandemi terdapat 6.000 pekerja. Ketika belum ada pemberlakuan PPKM Darurat, pegawai hotel yang aktif bekerja tersisa 1.200 orang.

"Sekarang dengan adanya PPKM Darurat, [pekerja hotel] yang masuk separuhnya. Jadi yang dirumahkan separuhnya. Jadi ada potensi [penurunan

► Tidak amannya nasib pekerja hotel lantaran menurunnya tingkat kunjungan selama PPKM Darurat.

► Laporan yang masuk di SPSI Jogja berupa penurunan upah.

upah atau PHK, tapi itu] hanya asumsi saja. Tamu saja enggak ada," ungkapnya, Senin (13/7).

Sebagai gambaran, untuk hotel bintang satu, pekerja yang masuk hanya satu sampai lima orang. Pekerja ini bekerja dengan sistem shift, berjaga-jaga apabila ada tamu yang datang sementara untuk hotel bintang empat atau lima, pekerja yang masuk sekitar 30 orang.

Untuk sektor lain belum ada laporan atau pengamatan terkait dengan potensi turun upah atau PHK. Saat ini Dinsosnakertrans Jogja memberikan 250 kuisioner untuk perusahaan di Kota Jogja guna mendata usaha esensial dan kritikal yang masih beroperasi serta prosedur protokol kesehatan yang diterapkan.

Meski beberapa perusahaan atau tempat usaha meliburkan pegawainya selama PPKM Darurat, Rihari mengimbau pemilik untuk tetap membayar upah.

"[Pemilik usaha] kaget saat mendengar upah harus diberikan [meski pegawai diliburkan] karena perusahaan enggak produksi. Tapi tetap harus ada dialog, entah upah apa dan juga semampunya," katanya.

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Cabang Kota Jogja, Denta Julian, mengaku anggotanya yang bekerja di sektor formal belum ada yang melaporkan adanya PHK. Namun, anggota serikat buruh lain ada beberapa anggotanya yang di-PHK. Laporan yang masuk di SPSI Jogja berupa penurunan upah.

"Kebanyakan [penurunan upah] di sektor niaga [mal dan supermarket], ada yang hingga 75 persen pengurangan upahnya. Pengurangan disebabkan pendapatan perusahaan turun dan pembatasan jam operasional sehingga dalam sepekan tidak masuk tiap hari dan ketika tidak masuk tidak dibayar," papar Denta, Rabu (14/7).

anjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005